

Kualitas Pelayanan Lembaga BKKBN terhadap Perwujudan Program Pembangunan Nasional pada Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

dr. Rossy Herawati, M.Kes, M.Si
(BKKBN Prov. Sulawesi Selatan)
rossyherawati67@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate the role and effectiveness of the BKKBN (National Population and Family Planning Board) in expediting progress within the Population and Family Planning sector. Additionally, it seeks to analyze the facilitative and obstructive elements influencing the BKKBN's nationwide efforts to enhance development in this sector. Challenges and hurdles are discernible within the BKKBN's pursuit of its organizational vision and mission. Factors such as the availability of human and natural resources serve as essential facilitators towards the realization of the institution's objectives. It is imperative to emphasize the collective cooperation of all involved individuals in the execution of the BKKBN's initiatives. This collaboration stands as a vital strategy in attaining the institution's overarching objectives and advancing the cause of inclusive and equitable national development that benefits all segments of society.*

Keywords: Service quality; National Development Program; Population Sector.

Abstrak: Artikel ini ditulis untuk mengetahui fungsi serta peran lembaga BKKBN dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi lembaga BKKBN secara nasional dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi lembaga BKKBN dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi antara lain: ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi faktor penunjang pencapaian tujuan lembaga. Olehnya dapat dipahami bahwa kerjasama semua dalam penyelenggaraan program kerja pada lembaga BKKBN sangat diperlukan sebagai upaya pencapaian sasaran organisasi guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; Program Pembangunan Nasional; Sektor Kependudukan.

PENDAHULUAN

Pembangunan dewasa ini dipeperhadapkan pada era perkembangan yang sangat cepat, sehingga masyarakat semakin dituntut untuk mengejar kebutuhan yang layak seperti kebutuhan akan pendidikan, terjaminnya rasa aman, pemenuhan kualitas pelayanan

kesehatan termasuk di dalamnya perbaikan gizi masyarakat, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan lain – lain.

Mencermati terlaksananya program pembangunan khususnya pada bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana terdapat sejumlah tantangan yang ditemui pemerintah dan *stakeholder* berkepentingan seperti yang ditulis oleh Mardiya (2021) bahwa Kualitas SDM di negara kita yang ingin berumah tangga sekitar 30 persen masih berada di bawah standar. Kurangnya kesiapan mental dan minimnya ketersediaan materi bagi pasangan yang hendak menikah menimbulkan dampak kurang baik terhadap kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Rendahnya kualitas SDM tersebut menghasilkan pula generasi selanjutnya yang kurang berkualitas. Terjadi lonjakan pernikahan usia dini. Satu dari sembilan anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun.

Dewasa ini terdapat 1,2 juta terjadi kasus pernikahan anak yang memposisikan Indonesia berada di urutan ke-8 di dunia mengenai pernikahan di bawah umur. Kasus pernikahan di usia dini tersebut menimbulkan masalah berupa anak gagal tumbuh, dan lain-lain diakibatkan oleh jumlah pasangan yang menikah dini tidak memahami cara mengatur jarak aman kelahiran agar anak-anak mereka bisa lahir dan tumbuh sehat. Hamil dan melahirkan di usia belia. Tercatat setiap tahun banyak anak perempuan yang melahirkan berusia 15 sampai dengan 19 tahun.

Sekarang ini angka perempuan di bawah umur yang melahirkan anak kurang lebih berjumlah 500 ribu orang. Perempuan melahirkan di bawah umur menimbulkan bayi lahir prematur dan mencapai kurang lebih 20 persen. Selain itu pula melahirkan di usia dini berisiko terhadap munculnya pendarahan, serta kanker mulut rahim setelah menikah. Rendahnya pemahaman, pengetahuan dan edukasi Tumbuh Kembang Anak. Sekarang ini kesadaran mempersiapkan 1.000 hari pertama kehidupan bayi belum terwujud sesuai target. Padahal kecukupan asupan gizi dan nutrisi pada rentang usia bayi tersebut menjadi faktor utama agar bayi yang lahir menjadi generasi baru yang tumbuh sehat, kuat, unggul dan bermutu. Bayi yang lahir menderita dan tidak mendapatkan asupan gizi dan nutrisi bisa menderita gizi buruk dan memicu stunting. Pengetahuan yang minim pada diri remaja mengenai perlunya perencanaan keluarga yang meliputi 5 (lima) tahapan kehidupan) yaitu: melaksanakan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman bergizi, meraih impian atau cita-cita melalui pendidikan yang baik, mempunyai karier dan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan serta menjadi anggota masyarakat dan keluarga. Kelahiran bertambah pesat setelah pandemi covid 19 dengan laju pertumbuhan 1,25 persen di tahun 2021 dan jumlah penduduk yang bertambah 3.2 juta orang setiap tahun.

Selain 6 (enam) permasalahan nasional terdapat berbagai macam kendala yang terjadi pada masing-masing daerah terkait dengan perwujudan program Kependudukan dan Keluarga berencana seperti yang disampaikan Mandas, dkk (2018) menemukan masalah

distribusi alat dan obat kontrasepsi yang kurang lancar, terbatasnya kemampuan pengelola di kabupaten/kota, jumlah petugas tenaga lapangan KB yang menurun dan lain sebagainya.

Selanjutnya, Christi & Aprianti (2022), menuliskan bahwa program KB tidak berpengaruh signifikan terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk khususnya di propinsi Kalimantan Timur. Demikian pula permasalahan kependudukan dan keluarga berencana di propinsi Gorontalo terutama yang terjadi di desa-desa atau wilayah yang jauh dari pusat kota seperti kasus gizi buruk dan kematian ibu melahirkan masih seringkali terjadi karena minimnya kuantitas dan kualitas petugas KB dan fasilitas pendukung yang memadai, kurangnya dukungan masyarakat terhadap program KB, dan komunikasi pihak *stakeholder* yang jarang terjadi.

Mencermati permasalahan tersebut di atas sepantasnya pemerintah melalui lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menorehkan program-program berkualitas yang diukur dari bertambahnya minat masyarakat dalam mengikuti program KB, kasus gizi buruk yang terus berkurang serta tercapainya program-program lain yang melekat pada instansi atau lembaga BKKBN.

Agar program pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang diharapkan maka hendaknya instansi berkepentingan dalam hal ini BKKBN menerapkan prinsip-prinsip kerja organisasi yang dapat diimplementasikan pada instansi BKKBN di seluruh Indonesia sebagai pendukung tercapainya visi dan misi BKKBN mulai dari Pusat sampai ke Daerah. Prinsip-prinsip kerja tersebut yaitu, setiap ASN baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional hendaknya: 1) Memiliki niat yang tulus dalam bekerja, 2) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) Disiplin yang tinggi serta bersungguh-sungguh dalam menegakkan aturan, 4) Maju dan mandiri mengembangkan organisasi atau lembaga, 4) Komunikatif dan luwes dalam pergaulan sosial, 5) Berinisiatif memecahkan permasalahan yang dihadapi, 6) Menjadi contoh dan teladan di lingkungan kerja, 7) Mempunyai target capaian terhadap pengembangan organisasi secara realistis (L. Muda: 2015)

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan pada sektor Kependudukan dan KB semestinya semua SDM lembaga BKKBN baik atasan maupun bawahan bergerak serentak, bersinergi dan saling berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi lembaga. Bertolak dari kenyataan itu, maka perlu disadari bersama bahwa lembaga BKKBN merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemui pada bidang Kependudukan dan KB. Pemilihan strategi yang tepat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan menyukseskan program keluarga berencana meminta segenap elemen terkait untuk lebih bijak menyikapi peran ataupun fungsi lembaga BKKBN secara nyata di lingkungan publik. Oleh karena itu perwujudan kerjasama, pertukaran arus informasi dan komunikasi

antar sesama ASN di lingkungan BKKBN serta ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya pendukung organisasi maupun lembaga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti merumuskan dua rumusan permasalahan antara lain: 1) Bagaimana peran lembaga BKKBN dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana? 2) Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi lembaga BKKBN secara nasional dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana?

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yaitu bertujuan mendefinisikan dan mendeskripsikan suatu kondisi dan fenomena apa adanya. Waktu penelitian yang digunakan peneliti selama 3 (tiga) bulan mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2023. Lokasi penelitian mengambil kasus yang terjadi secara nasional dan 3 (tiga) propinsi yaitu propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo dan Kalimantan Timur.

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilakukan melalui metode wawancara dengan informan yang memahami betul tentang program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta informan yang pernah menerima dan merasakan langsung manfaat program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara itu, Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan data lapangan terkait dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interkatif yang di dalamnya terdapat 4 (empat) komponen analisis utama antara lain: komponen pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Lahirnya Organisasi BKKBN

Dikutip dari sebuah artikel kedudukan BKKBN ditinjau dari sejarah berdirinya terjadi dalam beberapa kurun waktu yaitu,

Periode perintisan (1950 – 1966)

Pada periode tersebut organisasi Keluarga Berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia yang disingkat PKB dan memperjuangkan terwujudnya keluarga yang

sejahtera melalui 3 (tiga) macam usaha pelayanan meliputi: mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasehat perkawinan. Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai Badan Hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan Maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Periode keterlibatan pemerintah dalam program KB Nasional dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut: Pertama, PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai yang akan dijadikan program pemerintah. Kedua, PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan. Ketiga, PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faaedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan sidang DPRGR menyampaikan dalam pidatonya berupa pentingnya memberikan perhatian serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan kontrasepsi Keluarga Berencana yang dapat dibenarkan oleh moral Agama dan moral Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1968 kepada menteri Kesejahteraan Rakyat yang isinya antara lain:

1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.

Atas Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 1968 mengeluarkan SK. No. 35/KPTS/Kesra/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang statusnya sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974)

Pada periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Keppres No. 8 Tahun 1970 dan mengangkat dr. Suwardjo Suryaningrat sebagai kepala BKKBN. Dua tahun berikutnya keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai

penyempurnaan organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada, dan berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah presiden untuk melaksanakan kebutuhan program yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Periode Pelita II (1974 – 1979)

Kedudukan BKKBN yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas pokok mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan Kependudukan dan yang mendukungnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok di lapangan. Pada periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi kesehatan ini mulai dipadukan sektor-sektor yang pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (*Beyond Family Planning*) yang mulai merintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project

Periode pelita III (1979 – 1984)

Pada periode tersebut dilakukan pendekatan kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Selanjutnya pada periode ini muncul strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi berbentuk Mass Campaign yang dinamakan "Safari KB Senyum Terpadu"

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada periode ini kepala BKKBN dipercayakan kepada Prof. Haryono Suyono. Pada masa itu muncul pendekatan baru seperti pendekatan koordinasi aktif, sinkronisasi penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat. Di samping itu dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program. Pada periode itu pula secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan oleh presiden Soeharto dalam acara penerimaan KB Lestari di TMII. KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru.

Periode Pelita V (1988 – 1993)

Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan SDM dan pelayanan KB. Pada periode ini pula ditetapkan UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan GBHN 1993 khususnya sub Sektor Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, sehingga diambil kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kehamilan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI (1993 – 1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu "Pendekatan Keluarga" yang bertujuan menggalakkan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Pada periode ini pula terjadi reformasi pembangunan pada tanggal 21 Mei 1998. Terjadi pergantian kepala BKKBN yakni Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi menteri Kependudukan menggantikan Prof. Haryono Suyono selaku kepala BKKBN yang menjadi Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan.

Periode Pasca Reformasi

Pada periode tersebut BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam mendukung program BKKBN dengan visi "Penduduk tumbuh seimbang 2015" dengan misi "Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera". Dan untuk mewujudkan visi misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Pada periode ini pula dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugas dan memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pada Masa Kepemimpinan presiden Joko Widodo

Pada masa ini kepemimpinan presiden Joko Widodo melantik dr. Surya Candra Surapaty, MPH, Ph.D sebagai kepala BKKBN pada tanggal 26 Mei 2015, kemudian pada tanggal 1 Juli 2019 presiden Joko Widodo melantik dr. Wardoyo, Sp. OG (K) sebagai kepala BKKBN. Adapun program kerja lembaga BKKBN periode ini, terdiri 4 (empat) prioritas yaitu: percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi kampung berkualitas (Kampung KB) dan program Bangga (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)

Peran lembaga BKKBN dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam mewujudkan program pembangunan khususnya pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana sejumlah tugas pokok dan fungsi disusun agar peran BKKBN terlihat dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga BKKBN mempunyai tugas yakni, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
5. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
6. Penyusunan desain Program KKBPK;
7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
8. Pengelolaan dan penyediaan obat dan alat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur (PUS) nasional;
9. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
13. Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
14. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
15. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.

Selain melaksanakan lima belas fungsi di atas lembaga BKKBN layaknya organisasi lainnya yang juga menyelenggarakan fungsi lain yang terkait dengan peran organisasi/lembaga maka BKKBN melaksanakan fungsi lain seperti:

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di KKB;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas - tugas di lingkungan BKKBN; dan
5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Menyikapi tugas dan fungsi BKKBN secara umum dapat dijelaskan bahwa lembaga BKKBN telah memberikan hasil kerja yang sangat baik. Kinerja baik tersebut tergambar dari prestasi yang diperoleh beberapa perwakilan BKKBN di daerah, seperti di propinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh penghargaan diawal tahun 2023 sebagai propinsi yang memberikan pelayanan KB terbanyak III pada pelayanan KB serentak di awal tahun 2023.

Prestasi tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan KB kepada masyarakat tidak hanya dilakukan ketika masyarakat datang berkunjung ke tempat pelayanan KB akan tetapi

prestasi ini diperoleh salah satunya memberikan kemudahan dalam pelayanan KB kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pelayanan mobile meskipun mengambil waktu pada hari libur. Demikian pula, prestasi tersebut dapat diraih karena terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar pemerintah daerah, organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) institusi TNI, POLRI dan lembaga terkait lainnya. (sumber berita, Koma.co.id, 2023).

Prestasi yang sama sebelumnya diraih propinsi Bengkulu yang berhasil dalam capaian KB sejuta akseptor yang digelar serentak pada rangkaian peringatan HARGANAS tahun 2022 serta Apresiasi Piawai DAK 2022. Apresiasi tersebut atas pengawalan integritas dan akuntabilitas wilayah, selaku tim pengendali DAK tingkat propinsi dalam inovasi percepatan penyerapan anggaran DAK subbidang fisik KB fisik dan BOKB yang meraih kategori juara I (Sumber berita, laman BKKBN Bengkulu, 2022).

Selain prestasi di daerah, lembaga BKKBN kembali meraih penghargaan tertinggi di dunia dalam bidang Kependudukan, *The 2022 United Nations Population Award* (UNPA) atau penghargaan dunia di bidang Kependudukan untuk kategori institusi. BKKBN sebagai perwakilan Indonesia telah berhasil menyisihkan kandidat lain yang berasal dari 193 negara anggota PBB. *Executive Direktur* UNFPA Pusat di New York, Natala Kanem menyampaikan Indonesia melalui koordinasi BKKBN dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan tetap Republik Indonesia mengusulkan agar BKKBN mewakili delegasi Republik Indonesia sebagai nominasi untuk bersaing meraih Penghargaan Kependudukan perserikatan bangsa-bangsa UNPA dengan nominasi lainnya yang telah diusulkan/organisasi. (Sumber berita, Antara Jateng, 2022).

Mencermati penghargaan yang diraih BKKBN 1 (satu) tahun terakhir sejak 2022-2023 dapat dikatakan lembaga BKKBN merupakan salah satu lembaga/organisasi yang gigih berusaha menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga/organisasi yang turut serta dalam perwujudan pembangunan Nasional pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana. Idelnya lembaga BKKBN memiliki rencana program-program sistematis dan terencana dalam perwujudan pembangunan nasional pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga diharapkan peran serta unsur pimpinan, dan ASN BKKBN memaksimalkan kinerja, potensi diri, memfungsikan segala sumber daya lembaga dan menjalin kerjasama dengan *stakeholder* atau instansi terkait. Lembaga BKKBN yang mengembangkan akses terbuka bagi masyarakat dinilai memudahkan pencapaian kinerja sesuai peran dan fungsi BKKBN.

Demikian juga pengelolaan lembaga BKKBN yang dilaksanakan berdasarkan program kerja, peran dan fungsi BKKBN dalam mendukung program pemerintah yang terencana, terkontrol dan mengakomodasi seluruh komponen lembaga dapat menciptakan program sesuai peran dan fungsi BKKBN menjadi lebih sinergis. Demikian pula sikap menghargai

antar sesama ASN dan masyarakat yang datang berkunjung meminta bantuan terkait dengan peran dan fungsi BKKBN sangat terasa dilakukan sebagian besar ASN BKKBN dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan di atas memperjelas bahwa peran dan fungsi lembaga BKKBN dalam mencapai tujuan lembaga dapat terwujud dengan mudah dan lancar jika didukung oleh sikap dan perilaku yang baik dari semua elemen BKKBN. Sikap dan perilaku yang baik dapat meningkatkan gairah kerjasama antar sesama ASN dan menambah semangat masyarakat untuk selalu mengikuti program BKKBN. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa senang diperlakukan dengan baik oleh petugas. Perlakuan masyarakat yang turut serta mendukung program pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana dinilai sangat membantu perwujudan program BKKBN sesuai dengan peran dan fungsi BKKBN dalam menunjang program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Terkait dengan sikap dan perilaku terpuji yang dimaksud dapat ditinjau dari prinsip-prinsip pelayanan publik seperti yang ditulis oleh Hamim,dkk (2022, meliputi:

1) Berwujud (*tangible*)

Suatu kebutuhan publik yang berfokus pada penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, aparatur/pegawai dan alat komunikasi. *Tangebilitas* khususnya lingkungan fisik yang merupakan salah satu aspek organisasi/lembaga jasa yang mudah terlihat oleh konsumen, maka apapun bentuknya harus didesain dengan konsisten.

2) Empati (*emphaty*)

Ketersediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada pelanggan. Organisasi jasa dapat memosisikan dirinya sebagai pelayan jasa kepada publik berdasarkan empati yang dibangun di atas kebutuhan pelanggan akan perhatian, yaitu perhatian individual. Kemudian melakukan komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan para pelanggan.

3) Keandalan (*reliability*), kemampuan melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan meyakinkan. Pemenuhan janji pelayanan segera dan memuaskan dan jauh dari permasalahan organisasi. *Reliability* atau kepercayaan merupakan kecakapan dalam memberikan pelayanan yang tepat dan dapat diandalkan seperti ketersediaan waktu, tempat, sistem operasionalnya dan lain sebagainya.

4) Kesederhanaa berupa prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

5) Kejelasan, mencakup dalam hal persyaratan teknis dan administrasi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya berkenaan dengan peran dan fungsi BKKBN dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana terdapat upaya yang dilakukan lembaga yang didukung penuh para pemangku kepentingan

(*stakeholder*), Selain lima prinsip sebelumnya terdapat 1 (satu) prinsip yang diperoleh dari semua data yang telah dianalisis yaitu prinsip hasil akhir (*outcome*)

Maksud dari prinsip *outcome* yang diberikan BKKBN bagi kepentingan masyarakat berakhir pada penilaian yang sangat memuaskan. Mendukung penilaian tersebut Rewansyah (2010) menyebutkan bahwa penilaian hasil akhir kegiatan (*outcome*) dimaksudkan untuk memberikan bukti atau fakta akhir di mana pelayanan yang diberikan suatu lembaga/organisasi termasuk BKKBN mempertimbangkan dari 2 (dua) sisi pelaksanaan perencanaan program yaitu *outcome* jangka pendek, adalah hasil suatu tindakan tertentu atau prosedur tertentu. *Outcome* jangka panjang merupakan petunjuk aktif tidaknya proses pelayanan BKKBN terhadap perwujudan pembangunan berkualitas pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana yang terlihat pada pelayanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

BKKBN sebagai salah satu lembaga public tergambar dari wujud pelayanan sejak pertama kali lembaga tersebut beroperasi. Sederet prestasi dan kerja keras serta semangat melayani masyarakat ditunjukkan lembaga BKKBN meskipun terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik lembaga BKKBN pusat maupun perwakilan di daerah-daerah, namun pada umumnya lembaga BKKBN sudah maksimal dalam pencapaian hasil kerja sepadan dengan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Kualitas kinerja ataupun kualitas pelayanan BKKBN dapat dilihat dari sejumlah peningkatan jumlah masyarakat yang menyadari arti pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana, turut serta mencegah gizi buruk dan berbagai program pemerintah dalam rangka perwujudan kehidupan masyarakat agar lebih sehat, sejahtera dan berkualitas.

Faktor pendukung dan faktor penghambat perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Upaya perwujudan kualitas pelayanan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana pada dasarnya telah berjalan dengan baik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri dalam perwujudannya terdapat kendala yang ditemui terutama di lembaga BKKBN yang berperan besar terhadap perwujudan program kerja pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selanjutnya faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi sangat menentukan dalam mendukung perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui lembaga BKKBN. Tanpa komunikasi yang baik yang baik antar pemimpin lembaga BKKBN, komunikasi dengan unsur pemerintah pusat dan daerah, komunikasi sesama ASN di lingkungan BKKBN, dan komunikasi dengan masyarakat, maka dipastikan pemenuhan pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

Dari beberapa informan yang diwawancarai tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi dapat diketahui bahwa setiap arus informasi yang terjadi di dalam lembaga BKKBN maupun komunikasi yang terjadi di luar lembaga terkait dengan peran BKKBN dalam perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana memang sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi karena komunikasi berkenaan juga dengan informasi tentang bagaimana mekanisme dalam menjalankan tugas lembaga agar tugas setiap aparatur BKKBN dapat terlaksana dengan baik. Dukungan semua pihak atas peran BKKBN dalam mewujudkan program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui media komunikasi dan informasi dinilai sangat memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing ASN. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penyampaian informasi yang efektif dan mudah dipahami lawan bicara dapat membawa manfaat positif terhadap pelaksanaan tugas lembaga. Begitu juga sebaliknya kurangnya pemahaman dalam berkomunikasi bagi aparatur di lingkungan organisasi atau lembaga seperti sosialisasi tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan untuk kepentingan lembaga dapat merusak tatanan tugas yang hendak diselesaikan. Selanjutnya dapat dijelaskan pula rendahnya kesadaran dalam berkomunikasi dan memberikan informasi positif dinilai dapat menghambat perwujudan program kerja organisasi.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sopiah (2008) yang menuliskan empat fungsi komunikasi dalam sebuah organisasi/lembaga yakni:

- a) Komunikasi berfungsi sebagai pengendali perilaku anggota organisasi. Fungsi dapat berjalan apabila masing-masing aparatur diwajibkan untuk menyampaikan ide ide atau keluhan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur di dalam organisasi.
- b) Komunikasi berfungsi untuk membangkitkan motivasi aparatur atau bawahan yang dilakukan oleh pemimpin organisasi/lembaga.
- c) Komunikasi berperan sebagai penungkapan emosi. Fungsi ini berperan sebagai pengungkapan perasaan dan berperan ketika kelompok kerja aparatur atau pegawai menjadi sumber pertama dalam interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana masing-masing anggota kelompok dapat memperlihatkan kekecewaan atau rasa puas mereka.
- d) Komunikasi berperan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di mana komunikasi memberikan informasi yang diperlukan setiap orang dan kelompok dalam pengambilan keputusan dengan penyajian data guna mengenali dan menilai berbagai alternatif keputusan.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa komunikasi dilakukan untuk menyampaikan pemikiran, perasaan dan keinginan. Seseorang dapat mengkomunikasikan kebahagiaan, ketidak pastian, kegembiraan, penderitaan, keluhan,

memperoleh pengakuan, memperingatkan bersikap baik, meningkatkan harga diri, memerintah memberi pertolongan, memberi nasehat dan lain sebagainya.

Semua kegiatan sosial maupun pekerjaan termasuk pekerjaan dalam organisasi amat tergantung pada komunikasi yang merupakan media untuk berbagi ide, perasaan dan sumber daya. Jika komunikasi putus maka ketidaksepakatan dan kesalahpahaman dapat terjadi.

2. Faktor struktur birokrasi

Dalam mewujudkan program pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu lembaga atau organisasi publik membutuhkan struktur organisasi pelaksanaan yang benar-benar diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka struktur birokrasi sebagai salah satu faktor penerapan kebijakan oleh pemimpin dalam kerangka ini, dilihat merupakan masalah penting diperhatikan sekaligus dilakukan analisis mencari bukti bahwa faktor struktur birokrasi apakah berdampak atau tidak terhadap jalannya proses pelaksanaan program pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa faktor struktur birokrasi termasuk salah satu faktor pendukung terwujudnya kualitas pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana. Struktur birokrasi khususnya pada lembaga BKKBN menjadi faktor pendukung apabila lembaga atau organisasi tersebut tidak terjebak pada birokratisnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Mendukung data tentang pentingnya struktur biorkrasi BKKBN aparatur lembaga terkait segera memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan mereka pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana seperti penanganan gizi buruk yang cepat tanpa melanggar SOP atau aturan yang berlaku. Demikian pula untuk lebih memaksimalkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok BKKBN, lembaga tersebut menyederhanakan birokrasi sesuai aturan yaitu dilakukan dengan mengalihkan 671 pejabat struktural baik di BKKBN pusat maupun daerah ke dalam jabatan fungsional. Pengalihan tersebut bertujuan agar birokrasi atau lembaga lebih mudah mencapai percepatan sistem kerja dan fokus pada pekerjaan fungsional.

Sehubungan dengan upaya perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana ditinjau dari segi struktur birokrasi dapat dijelaskan bahwa kegiatan penyelesaian tugas dan tanggung jawab ASN pada lembaga BKKBN cendeung dipermudah dan tidak berbelit – belit. Para ASN BKKBN diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melanjutkan kuliah di perguruan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Meskipun tampak kemudahan yang diberikan lembaga BKKBN khususnya pada pemberian izin/tugas belajar kepada para ASN tetapi

birokrasi yang ditunjukkan belum memenuhi harapan. Dari hasil wawancara dengan informan diketahui sebagian ASN tidak mendapatkan pengakuan ijazah setelah melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi karena pihak lembaga tidak meneruskan pengurusan izin/rekomendasi studi ke Badan Kepegawaian Negara. Terhambatnya pengurusan izin dan tugas belajar bagi ASN secara kelembagaan dinilai merugikan ASN dan lembaga itu sendiri.

Struktur birokrasi juga menerapkan mekanisme-mekanisme formal menunjukkan pola dan kerangka di antara peranan-peranan, posisi maupun orang yang menggambarkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda pada sebuah organisasi termasuk lembaga BKKBN. Layaknya organisasi/lembaga lainnya terhadap upaya perwujudan pembangunan semestinya selain melaksanakan penyederhanaan birokrasi lembaga BKKBN lebih peduli lagi terhadap pengurusan birokrasi baik bagi *stakeholder* maupun ASN BKKBN itu sendiri.

3. Faktor Sumber Daya.

Faktor sumber daya terdiri dari yaitu: faktor sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya alam (SDA) diciptakan manusia, dan hanya dengan proses alami sumber daya ini bisa dihasilkan untuk mendukung peningkatan produktivitas. Sementara sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang berasal dari diri manusia dan bisa berperan dalam sebagai faktor produksi dalam meningkatkan produktivitas kerja dan produksi modal (*capital resources*).

Capital resources mewujudkan pada investasi/modal atau financial juga sebagai faktor produksi dalam kerangka produktivitas kerja. Pada bagian ini SDM dituntut agar bisa memanfaatkan dengan baik aset organisasi, atau SDM dapat menemukan berbagai cara atau strategi yang dapat mengelola potensi SDA menjadi aset organisasi yang bisa digunakan dalam mencapai produktivitas dan efektivitas kerja organisasi, misalnya mengupayakan ketersediaan fasilitas atau penunjang kerja bagi organisasi/lembaga. Untuk memenuhi ketersediaan fasilitas (aset) dan menjaga ketersediaan aset organisasi dibutuhkan SDM yang handal, profesional, berdedikasi dan berintegritas. (L. Muda: 2023).

Sesuai data yang diperoleh dapat dideskripsikan bahwa SDM yang dimiliki lembaga BKKBN secara nasional atau ASN di daerah-daerah menunjukkan bahwa terdapat daerah atau wilayah memiliki jumlah SDM yang relatif kurang. Demikian juga ditinjau dari segi kompetensi menunjukkan sebagian ASN BKKBN belum memiliki keterampilan yang diharapkan lembaga terutama yang berada di pelosok-pelosok wilayah. Menyikapi permasalahan tersebut yang didapat dari jawaban informan terkait ketersediaan SDM yang handal dan amanah maka lembaga perlu mengambil 2 (dua) langkah yakni:

- a. Rutin mengadakan pertemuan antar pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan lembaga BKKBN Pusat dan Daerah dalam rangka penyelesaian konflik internal yang terjadi untuk mencari solusi/jalan keluarnya secara bersama-sama.
- b. Pengembangan tim kerja yang menanamkan kejujuran dan saling terbuka terhadap urusan kerja lembaga. Metode atau strategi pengembangan ASN didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai. Apakah ingin mengembangkan kemampuan/keterampilan teknis, mengerjakan pekerjaan (*technical skill*) atau meningkatkan keahlian dan kecakapan pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam mengatur tugas serta mengambil kebijakan.

Dengan demikian dapat dikemukakan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh yaitu, meskipun lembaga BKKBN merupakan lembaga non pemerintah namun perhatian pemerintah terhadap lembaga tersebut dinilai benar-benar maksimal sejak lembaga BKKBN berdiri sampai dengan sekarang meskipun masih terdapat kekurangan di lembaga tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa meskipun terjadi perbedaan perilaku, dan strategi kerja ASN pada masing-masing lembaga BKKBN yang berada di daerah/propinsi namun memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan pembangunan berkualitas pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu program pemerintah yang mesti ditunjang dengan sepenuh hati. Demikian pula dari data yang diperoleh terlihat permasalahan yang dihadapi lembaga BKKBN diberbagai daerah cenderung berbeda, akan tetapi umumnya permasalahan yang dihadapi setiap organisasi termasuk lembaga BKKBN berputar-putar pada masalah komunikasi, struktur birokrasi, masalah SDM, masalah ketersediaan SDA dan fasilitas/sarana prasarana organisasi.

Meskipun ditemukan 3 (tiga) permasalahan organisasi yang biasanya terjadi khususnya pada lembaga BKKBN namun terdapat pula faktor pendukung lain yang terkait erat dengan pengaruh komunikasi, struktur birokrasi dan pengaruh sumber daya meliputi:

- a. Ketersediaan anggaran memadai yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya mendukung program kerja lembaga BKKBN.
- b. Lebih banyak melibatkan *stakeholder* terkait serta memaksimalkan upaya pemberdayaan kepada ASN di lembaga BKKBN.

Kedisiplinan dalam bekerja bukan saja hanya terlihat pada para pemimpin atau pejabat struktural akan tetapi sikap disiplin ditunjukkan oleh ASN dalam jabatan fungsional. Pada umumnya semua komponen lembaga BKKBN saling bahu membahu mewujudkan program pembangunan pada sektor Kependudukan dan KB sebagai bukti pertanggung jawaban kerja kepada pemerintah dan masyarakat terutama pertanggung jawaban terhadap Allah SWT atas amanah yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Faktor komunikasi, struktur birokrasi dan faktor sumber daya sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi/lembaga termasuk lembaga BKKBN. Apabila ketiga faktor tersebut tersedia di dalam organisasi maka peran ketiga faktor berkenaan dinilai menunjang program organisasi, namun jika ketersediaan ketiga faktor tersebut sangat terbatas maka dapat dipastikan terjadi kepincangan dalam pemenuhan kualitas atau perwujudan proses kerja dan hasil kerja suatu organisasi/lembaga.

1. Komitmen pemerintah baik di pusat maupun di daerah terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang program pembangunan dan program kerja lembaga BKKBN senantiasa mendapat perhatian dengan mengalokasikan dan mengucurkan biaya untuk pemenuhan keperluan organisasi/lembaga dalam rangka perwujudan pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Dalam pelaksanaan tugas pembangunan pada sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana lembaga BKKBN pusat maupun di daerah selalu mengkomunikasikan rencana-rencana dan program kerja kepada semua *stakeholder* berkepentingan.

Guna menunjang berbagai kegiatan dan program kerja pada lembaga BKKBN tetap mengutamakan ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang kegiatan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Jateng. 2022. *BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Bidang Kependudukan dari PBB*. <https://jatengantara.news.com>
- Arum, Rifda. *Tujuan Pembangunan Nasional: Pengertian, Azas, Paradigma, dan Landasan Pelaksanaan*. <https://www.granedia.com>
- Christi & Aprianti. 2022. *Pengaruh Program Keluarga Berencana dan Perempuan Bekerja terhadap Pertumbuhan Penduduk di Kalimantan Timur*, <https://journal.feb.unmul.ac.id>
- Hamim, S. dkk. 2020. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*. <https://journal.uir.ac.id>
- Koma.co.id. Makassar. 2023. *BKKBN Sulsel Sabet Penghargaan Pelayanan KB tahun 2023*
- Kusnaedi, MS. 2021. *Pengertian dan Konsep Dasar Sumber Daya*. <https://pustaka.ut.ac.id>
- Laya, Mirza. 2021. Tesis. *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo: Universitas Bina Taruna
- Laman Antara, Jateng. 2022. *BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Bidang Kependudukan dari PBB*. <https://jatengantara.news.com>
- Laman Kominfo. 2016. *Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat*. <https://www.kominfo.go.id>
- Mandas, Israel Samuel Theodorus, dkk. 2018. *Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Utara (Studi BKKBN Prov. Sulawesi Utara)* <https://journal.unsrat.ac.id>

- Mardiya. 2021. *Isu Kependudukan dan Keluarga Berencana*. <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id>
- Mesiono, Ilwan. 2021. *Kepemimpinan Organisatoris sebagai Sharing Power dalam Mewujudkan Keseimbangan Hubungan Atasan dan Bawahan pada MTsn Bireuen*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
- Muda, Lisdawati. 2015. *Kepemimpinan Manusia Berkarakter*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Press.
- Muda, Lisdawati. 2023. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Mulyana, Dedi. 2022. *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Putri, Vanya Karunia Mulia. 2022. *Fungsi atau Kegunaan Struktur Organisasi*. <https://www.kompas.com>
- Talalu, Abu Bakar & Titin Nasir. 2018. *Kemampuan Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (S.PPKBD) dalam Pendataan Keluarga di Desa Pontolo Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*. <https://stiabinataruna.ejournal.id>
- Rewansyah, Asmawi. 2008. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: yusaintanas Prima
- Sitoresmi, Ayu Rifka. 2021. *Birokrasi adalah Struktur Tatanan Organisasi, Ketahui Definisi para Ahli dan Fungsinya*. <https://www.liputan6.com>
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi
- Tri Kartono, Drajat & Hanif Nurcholish. 2016. *Konsep dan Teori Pembangunan*. <https://scholar.google.com>
- Sejarah BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id>